



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI
PENGADAAN PNS DAN PPPK TA 2025**

**BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI ASN
2025**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jln. H. Ilyas Yacub, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611 Telepon (0756) 22014,
Laman : <https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : bkpsdm@pesisirselatankab.go.id

A. PENDAHULUAN

Tahun 2025 menjadi periode lanjutan dalam upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menuntaskan kebijakan penataan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Setelah pelaksanaan tahapan seleksi pada tahun 2024, berbagai proses strategis masih berlanjut pada tahun 2025, khususnya dalam penyelesaian pengadaan dan penataan pegawai non-ASN secara bertahap dan terencana, dengan tetap memperhatikan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelayanan publik.

Pelaksanaan pengadaan ASN Tahun Anggaran 2025 merupakan kelanjutan dari rangkaian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 yang prosesnya masih berjalan. Tahapan ini mencakup penyelesaian seleksi, penetapan Nomor Induk ASN, pengangkatan, serta penataan lanjutan terhadap tenaga non-ASN yang belum terakomodir dalam formasi sebelumnya. Pemerintah Daerah tetap berkomitmen mengoptimalkan peluang bagi tenaga non-ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pada tahun 2025 di mulai dengan Pengumuman Hasil Akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Hasil Akhir Seleksi CPNS untuk kemudian dilanjutkan dengan penetapan NIP dan NI PPPKnya, serta pengusulan formasi PPPK Paruh Waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu mulai dari pengusulan formasi sampai dengan penerbitan SK diselesaikan dalam tahun 2025.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam tahun ini juga menegaskan Non ASN yang dapat dilakukan perpanjangan kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 800.1.2.7/08/BKPSDM/2025 tanggal 13 Februari 2025, begitupun penegasan terkait status kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui Surat Edaran Bupati Nomor 800.1.2.7/02/BKPSDM/2026 pada tanggal 2 Januari 2026

Koordinasi dan konsultasi dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK seperti Inspektorat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dibutuhkan untuk terlaksananya program kegiatan berjalan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan serta pengelolaan ASN Tahun Anggaran 2025. Melalui laporan ini diharapkan dapat tergambar secara menyeluruh proses yang telah dilaksanakan, capaian yang diperoleh, serta berbagai tantangan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas tata kelola ASN di masa mendatang.

B. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Penyusunan Formasi ASN bertujuan untuk menentukan jumlah dan susunan perangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, serta agar Organisasi Perangkat Daerah mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing organisasi.

Penyusunan formasi dan proyeksi ASN 5 (lima) tahun ke depan dilaksanakan pada tahun 2026 setelah penataan non ASN selesai, dan melalui kegiatan penyusunan formasi ASN diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat memetakan dan mendistribusikan aparaturnya sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing unit kerja, sehingga pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tersedia merata bagi masyarakat Pesisir Selatan.

Seleksi ASN bertujuan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur guna mengisi kekurangan atau kebutuhan formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bersih dan memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan, tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan serta memiliki karakter sebagai PNS yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan lain dari Seleksi ASN ini adalah untuk memperoleh ASN yang profesional, jujur, bertanggungjawab dan netral, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan kepada masyarakat;
2. Mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memiliki intelegensia yang tinggi untuk dapat mengembangkan kapasitas kinerja organisasi pemerintah;
4. Mewujudkan sistem seleksi pengadaan PNS yang bersih, obyektif transparan, kompetitif dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya;

Dalam rangka penyelesaian penataan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, diusulkan formasi P3K Paruh Waktu sebanyak 4.207 orang dan setelah melalui proses administrasi di terbitkan sebanyak 4.191 SK P3K Paruh Waktu yang telah diserahkan pada akhir Desember 2025 dengan rincian tenaga teknis sebanyak 2.346 orang, guru 1.158 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 687 orang.

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Terlaksananya sistem penentuan dan penempatan jabatan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan analisis jabatan dan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
2. Tersedianya data dan informasi Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat diakses melalui aplikasi e-Formasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Tersedianya data usulan bagi PNS dan melalui aplikasi e-Formasi versi 4.1
4. Terlaksananya kegiatan Seleksi ASN yang menghasilkan ASN sesuai dengan kebutuhan formasi dan standar kompetensi yang dipersyaratkan;

5. Memperoleh putra-putri bangsa yang kompeten menjadi PNS dan ;
6. Seleksi pengadaan PNS yang kompetitif dan berbasis kompetensi sebagai landasan dasar pembentukan profesionalisme PNS dan pembentukan birokrasi yang modern menuju birokrasi kelas dunia;
7. Mengembalikan kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda bahwa untuk menjadi PNS harus bertumpu pada kemampuan diri sendiri;
8. Tersedianya kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan distribusi kompetensi yang dipersyaratkan.

C. KEGIATAN

Pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK tidak terlepas dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana setiap instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan pagu dana awal sebesar Rp. 207.001.000,- (dua ratus tujuh juta satu ribu rupiah) dan setelah pergeseran anggaran sebesar Rp.115.000.150,- (seratus lima belas juta seratus lima puluh rupiah), dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2	Pelaksanaan seleksi administrasi bagi Calon PPPK formasi tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 16 Desember 2024 s.d 3 Februari 2025 dengan hasil Calon PPPK Pemerintah Kab. Pesisir Selatan yang dinyatakan lolos untuk dapat mengikuti seleksi kompetensi sebanyak 1120 orang
2.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	Seleksi Calon PPPK dilaksanakan dalam rentang waktu 17 April s.d.16 Mei 2025. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Grand Basco Hotel di Padang dengan penyelenggaranya adalah Badan Kepegawaian Negara
3.	Usul NIP CPNS	Pelaksanaan usul NIP CPNS dimulai pada tanggal 22 Februari s.d. 23 Maret 2025 di ruangan bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN
4.	Penyerahan SK CPNS	Pada tanggal 2 Juni 2025 dilaksanakan penyerahan SK CPNS formasi tahun 2024 bertempat di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan
5.	Usul Penetapan NI PPPK Tahap 1	Pada tanggal 1 s.d. 31 Juli 2025 dilaksanakan pengusulan NI PPPK Tahap 2
6.	Penyerahan SK PPPK Tahap 1	Penyerahan SK PPPK formasi tahun 2024 Tahap 1 dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan pada tanggal 25 Agustus 2025

7.	Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	Pengusulan formasi PPPK Paruh Waktu oleh PPK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 25 Agustus 2025 sebanyak 4.207 orang yang terdiri dari 3.215 orang non-ASN yang terdata di database BKN dan 992 orang non ASN yang tidak terdata pada database BKN. NI PPPK Paruh Waktu yang diusulkan sebanyak 4.191 pada tanggal 28 Agustus s/d 28 September 2025
8.	Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu	Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu sebanyak 4.191 orang dilaksanakan secara simbolis di GOR H. Ilyas Yacub Painan

D. HASIL YANG DICAPAI

Tersedianya pegawai ASN yang kompeten melalui seleksi pengadaan CPNS serta terselenggaranya penataan non ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Pada tahun 2026, sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK tahun 2026 melaksanakan penyelesaian administrasi bagi PPPK yang akan diperpanjang kontrak kerjanya, serta penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian laporan pelaksanaan sub kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK tahun 2026 ini kami sampaikan, terima kasih.

Diketahui / Disetujui Oleh :
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
(Pengguna Anggaran)



YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750101 200003 1 003

Painan, 15 Januari 2026
Dibuat Oleh ;
Kabid PPI ASN
(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)



BOBY SOERYATMOJO, ST.,M.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19771219 200604 1 002

**DOKUMENTASI SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI
PENGADAAN PNS DAN PPPK TAHUN 2025**

**1. PROSES USUL NI PPPK FORMASI TAHUN 2024
LOKASI : AULA BKPSDM KAB. PESISIR SELATAN**



**2. PENYERAHAN SK PPPK FORMASI TAHUN 2024 TAHAP 1
LOKASI : KANTOR BUPATI PESISIR SELATAN**





**3. SELEKSI PENGADAAN PPPK FORMASI TAHUN 2024 TAHAP 2
LOKASI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PADANG (SKD) DAN UNIVERSITAS BUNG
HATTA CONVENTION HALL (SKB)**



4. USUL NI PPPK FORMASI TAHUN 2024 TAHAP 2



5. RAPAT PEMBAHASAN UPAH PPPK PARUH WAKTU



6. PENYERAHAN SK PPPK FORMASI TAHUN 2024 TAHAP 2, 13 OKTOBER 2025





LOKASI : KANTOR BUPATI PESISIR SELATAN

**7. PENYERAHAN SK PPPK PARUH WAKTU
LOKASI : GOR ILYAS YACUB PAINAN**



